

JURNAL TELAHAH & RISET AKUHTANSI
Vol. 2. No. 2 Juli 2009
Hal. 117-132

KEBERHASILAN KEGIATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MELALUI PENGUNGKAPAN DAN AUDIT *CORPORATE SOCIAL* *RESPONSIBILITY*

Oleh:

Sri Fadilah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung

ABSTRAC

CSR is perceived as an activity undertaken by the company's donations (corporate philanthropy), while widely CSR is essentially a mechanism for integrating social issues and environmental issues into company operations and then communicate with stakeholders (stakeholders). In that sense, CSR is regarded as a new strategic framework to enhance competitiveness and achieve sustainable business. CSR Audit gives an overview of the audit framework for CSR programs. Aspects in the tables were developed based on the definition of CSR that have been formulated, as a: Concerns that companies set aside some of the profits (profit) for the benefit of human development (people) and environmental (planet) in a sustainable manner based on the procedure (procedure) an appropriate and professional. For this reason, in order to improve its CSR activities in accordance with the spirit of the meaning of an effort to fulfill its corporate social responsibility, the disclosure and auditing of CSR activities are very important. For this reason this paper with all its drawbacks tried to explain how the disclosure of CSR in which the related audit report also describes CSR CSR in order to improve the effectiveness of CSR activities.

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR Disclosure and Audit

1. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang tengah berkembang secara global dan penerapannya telah merambah ke sektor industri (awalnya perusahaan tambang) termasuk industri yang selama ini kelihatannya aman dan baik-baik saja, belakangan ini mulai disorot. Sebagai contoh, industri makanan dicela karena memproduksi makanan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tertentu, *supermarket* atau *hypermarket* dikritik karena kebijakannya yang membuat pemasok dan produsen menjadi kekurangan margin jika tidak boleh dikatakan merugi, industri perbankan diserang karena membiaya proyek-proyek yang merusak lingkungan dan industri asuransi diprotes karena kelalaiannya dalam menunaikan CSR. Suara-suara keras yang kerap dilontarkan melalui media masa oleh LSM yang dalam hal ini mereka bertindak mewakili kepentingan masyarakat termasuk generasi yang akan datang sebagai bagian dari stakeholder dalam sistem kelola perusahaan. Selanjutnya skandal akuntansi yang membuat

dunia heboh seperti kasus Enron, WorlCom dan Ahold telah turut pula menambah daftar pendukung CSR dari sudut dimensi *good corporate governance* (GCG). Bahkan organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi pun mulai peduli untuk mengimplementasikan konsep CSR, misalnya dalam bentuk kebijakan “kampus berwawasan lingkungan atau *green campus*”. Contoh tersebut menunjukkan konsep CSR telah diimplementasikan di semua kegiatan perusahaan baik sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada stakeholder.

Perusahaan yang mengadopsi dan menjalankan konsep CSR dewasa ini telah mendapat perhatian dari kalangan kreditor (secara khusus perbankan) dan investor (secara khusus dunia pasar modal). Dalam praktiknya, perusahaan dapat melaporkan implementasi CSR melalui laporan berkelanjutan. Dalam tingkat internasional, telah ada *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk membuat panduan atau standar laporan berkelanjutan ini. Indonesia telah turut dalam upaya ini dengan membentuk lembaga serupa GRI yang dikenal dengan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR). Ke depan perusahaan di Indonesia yang menerapkan dan melaporkan CSR dengan baik perlu mendapatkan dukungan dan penghargaan, baik pemerintah ataupun kalangan pasar modal. Pengungkapan kinerja CSR melalui laporan berkelanjutan kini semakin penting terutama untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Melalui laporan ini akan terungkap apakah perusahaan telah menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungannya secara optimal.

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Survey Pricewaterhouse Coopers (PwC) terhadap 750 Chief Executive Officers menunjukkan bahwa peningkatan tekanan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menempati ranking kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling penting di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan Hope, 2004). Meskipun sedang meroket, CSR tampaknya masih diselimuti kabut misteri. Belum ada definisi CSR yang mudah diukur secara operasional. Beberapa UU CSR di Indonesia belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif. Standar operasional mengenai bagaimana mengevaluasi kegiatan CSR juga masih diperdebatkan. Akibatnya, bukan saja CSR menjadi sulit diaudit, melainkan pula menjadi program sosial yang berwayuh wajah.

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan “*copy-paste design*” atau sekadar “menghabiskan” anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih. Walhasil, alih-alih memberdayakan masyarakat, CSR malah berubah menjadi Candu (menimbulkan ketergantungan pada masyarakat), Sandera (menjadi alat masyarakat memeras perusahaan) dan Racun (merusak perusahaan dan masyarakat) (Suharto, 2008).

Untuk itulah, dalam rangka meningkatkan kegiatan CSR dalam arti sesuai dengan spirit sebagai upaya menunaikan tanggung jawab sosial perusahaan, maka pengungkapan dan audit kegiatan CSR menjadi sangat penting. Untuk itulah makalah ini dengan segala kekurangannya mencoba menjelaskan bagaimana pengungkapan CSR yang di dalamnya berkaitan dengan pelaporan CSR juga menjelaskan audit CSR dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan CSR.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi dan bagaimana pengungkapan dan audit dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan.

2. PERKEMBANGAN DAN PENGERTIAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Cakupan CSR yang demikian luas merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang konsep CSR. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru, tetapi apa yang ada sekarang merupakan penyempurnaan dari apa yang sudah ada sebelumnya, begitu pula halnya dengan CSR. Sejak abad ke-15, perusahaan sudah menghadapi tekanan dari dua sisi yaitu tekanan untuk mencetak laba dari sisi pemilik dan tuntutan untuk memenuhi fungsi sosial dari sisi masyarakat. Sebagai contoh, bisnis yang dilakukan ke manca negara (dengan menggunakan armada pelayaran) oleh bangsa Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggris dikecam karena banyak kegiatan operasinya yang melanggar HAM, perdagangan budak dicela habis-habisan dan menadapat perlawanan keras, perdagangan yang dilakukan oleh VOC dinilai telah merampas hak-hak rakyat lokal, perlakuan yang jelek terhadap kondisi dan kesejahteraan kaum buruh di Inggris pada abad ke 19 telah memicu terjadinya pergolakan kaum buruh di beberapa kota industri di Inggris.

Jadi tuntutan terhadap CSR dalam bentuk sederhana sudah ada sejak 5 abad yang silam, sedangkan perkembangan CSR secara konseptual baru mulai dikemas sejak tahun 1980-an yang dipicu oleh sedikitnya 5 variabel berikut:

1. Maraknya fenomena “*take over*” antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial.
2. Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global.
3. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang. Banyak perusahaan multinasional termasuk di Indonesia yang dituntut supaya memperhatikan HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh, persis sama dengan yang terjadi pada waktu revolusi industri dua abad yang lalu.
4. Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kekhawatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin stabil.

5. Adanya kesadaran dari sektor korporasi akan arti pentingnya merk dan reputasi korporat dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. Semakin signifikan merk bagi suatu perusahaan, dengan menggunakan CSR, akan semakin kokohnya pertahanan terhadap serangan atas reputasi perusahaan.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tampaknya tidak ada keraguan bahwa CSR telah dan akan terus berperan penting dalam wacana dan praktik bisnis di dunia. Seiring dengan perkembangannya, banyak kalangan juga mendefinisikan CSR dengan sudut pandang yang berbeda-beda pula. Makanya, istilah CSR mempunyai berbagai interpretasi dan penamaan lain, seperti *Corporate citizenship*, *The ethical corporation*, dan *corporation sustainability*.

Secara sempit, CSR dipersepsikan sebagai kegiatan donasi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate philanthropy*), sedangkan secara luas CSR pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme pengintegrasian isu sosial dan isu lingkungan ke dalam operasi perusahaan dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam pengertian tersebut, CSR dianggap sebagai kerangka strategis baru untuk meningkatkan daya saing dan mencapai bisnis berkelanjutan.

Selain pengertian secara sempit dan luas di atas, terdapat pengertian CSR yang singkat namun mencakup semua unsur sesuai dengan pandangan mainstream saat ini tentang CSR telah diajukan oleh World Bank Group yang bunyinya: “*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”.

Untuk lebih mengembangkan pemahaman CSR yang lebih komprehensif, berikut ini adalah pengertian CSR dilihat dari berbagai disiplin ilmu:

- a. *CSR is expected to provide long-run benefit to shareholders by maintaining positive stakeholders relationship. (Lawrence Gitman dalam buku Principles of Managerial Finance, 10th Edition).*
- b. *CSR is more than ethical imperative, it is a social expectation. Around the world publics increasingly expect organizations to be good citizens, contributing to the social well-being of their communities. (David W Guth & Charles Marsh, dalam bukunya public relations: A value driven approach 3th edition)*

Berbagai pengertian di atas juga secara tidak langsung menjelaskan isu-isu yang terkandung di dalam CSR. CSR memiliki isu yang berbeda-beda, namun demikian secara umum terdapat 5 isu utama yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Tenaga Kerja (buruh)
- c. Lingkungan Hidup
- d. Sosial dan masyarakat
- e. Dampak produk dan jasa terhadap pelanggan

Berdasarkan lima isu tersebut, sekarang ini menjadi kajian utama CSR dalam pelaksanaannya baik di Indonesia maupun di Negara lain.

3.UNDANG UNDANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Di Tanah Air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini – sepengetahuan penulis, belum dikeluarkan.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 persen yang dapat digunakan untuk Program Kemitraan ataupun Bina Lingkungan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 2007)

Namun, UU ini pun masih menyisakan pertanyaan. Selain hanya mengatur BUMN, program kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Menurut Sribugo Suratmo (2008), kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan. Pertanyaannya: apakah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomi kedua belah pihak, dan apalagi hanya menguntungkan pihak pengusaha kuat (cenderung eksploitatif) bisa dikategorikan sebagai CSR? Meskipun CSR telah diatur oleh UU, debat mengenai "kewajiban" CSR masih bergaung. Bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasi bisnis.

Ada pula yang menyoal definisi dan singkatan CSR, terutama terkait huruf "R" (*Responsibility*). Dalam Bahasa Inggris, "responsibility" berasal dari kata "*response*" (tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu) dan "*ability*" (kemampuan). Maknanya,

responsibility merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena respon yang dilakukan disesuaikan dengan *ability* yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, kalau CSR bersifat wajib, maka singkatannya harus diubah menjadi CSO (Corporate Social Obligation). Selain itu, kalangan yang kontra UU CSR berpendapat bahwa *core business* perusahaan adalah mencari keuntungan. Oleh karena itu, ketika perusahaan diwajibkan memerhatikan urusan lingkungan dan sosial, ini sama artinya dengan mendesak Greenpeace dan Save The Children untuk berubah menjadi korporasi yang mencari keuntungan ekonomi. Kelompok yang setuju dengan UU CSR umumnya berargumen bahwa CSR memberi manfaat positif terhadap perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Selain menegaskan *brand differentiation* perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh *license to operate*, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga bisa berfungsi sebagai strategi *risk management* perusahaan (Suharto, 2008). Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia yang masih menerapkan *residual welfare state*, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, bagi kalangan yang setuju UU CSR, CSR merupakan instrumen *cash transfer* dan suplemen sistem "negara kesejahteraan residual" yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat karena kebijakan dan program sosial negara bersifat *fragmented* dan tidak melembaga.

4. PERHATIAN INVESTOR TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Perkembangan CSR begitu cepat disambut dengan antusias oleh para investor termasuk para banker. Hal ini ditandai dengan perkembangan *Socially Responsible Investment* (SRI) sejak beberapa tahun terakhir sedangkan kepedulian industri perbankan terhadap CSR ditandai dengan disepakatinya *The Equator Principles* (EPs) yaitu suatu sistem dan prosedur screening yang ketat guna menilai resiko CSR terhadap proyek-proyek yang mempunyai kaitan dengan lingkungan secara signifikan sebelum kredit diluncurkan. EPs pada mulanya disepakati oleh 10 bank internasional di Inggris pada tahun 2002. Saat ini tercatat sedikitnya 40 bank di seluruh dunia yang telah menandatangani EPs yang artinya adalah bahwa bank-bank tersebut, dimanapun mereka beroperasi, setuju menggunakan EPs sebagai basis dalam menilai kelayakan proposal yang diajukan oleh calon debitur yang kegiatan operasinya berdampak signifikan terhadap lingkungannya. Namun, patut disayangkan, sampai saat ini belum satupun bank nasional di Indonesia yang ikut menandatangani EPs. Hal ini tentu saja akan membawa konsekuensi buruk dalam industri perbankan di Indonesia yaitu adanya perlakuan yang tidak setara antara bank dalam prosedur penilaian CSR calon debitur. Bank yang terikat dengan EPs cenderung melakukan screening secara lebih ketat ketimbang bank yang belum menandatangani EPs.

Kemudian di sektor pasar modal, perhatian investor terhadap CSR juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan munculnya indeks saham seperti *FTSE4Good* dan *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) sejak beberapa tahun belakangan ini. Dalam kaitan ini, pasar modal Indonesia sebagai bagian dari pasar modal dunia yang memiliki investor tanpa batas negara, sudah waktunya untuk mempunyai indeks saham sejenis DJSI atau FTSE4Good agar pasar modal di negara kita lebih bergairah terutama SRI (*Socially Responsible Investment*).

Uraian di atas menunjukkan bahwa investor saat ini telah meleak CSR dengan memberikan perhatian yang besar bagi perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya motivasi bagi perusahaan, tidak saja mengimplementasikan CSR sebaik mungkin tetapi juga mampu mengungkapkan dan mengaudit kegiatan CSR tersebut.

5. PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Pengungkapan Kinerja *Corporate Social Responsibility* Melalui Laporan Berkelanjutan

Perusahaan yang sukses dalam menjalankan CSR memiliki tiga nilai dasar (*core value*) yang ditanamkan secara mengakar dalam perusahaan yaitu (1) ketangguhan ekonomi, (2) tanggung jawab lingkungan dan (3) akuntabilitas sosial. Jika kinerja keuangan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan, maka kinerja CSR akan dapat disimak melalui sebuah laporan yang disebut laporan berkelanjutan (*sustainability report*). Dalam prakteknya, ada yang menggunakan nama lain untuk laporan jenis ini, misalnya laporan CSR (*CSR report*), laporan sosial (*social report*), laporan lingkungan (*environment report*) atau laporan sosial dan lingkungan (*social and environment report*). Laporan CSR atau laporan berkelanjutan pada hakikatnya memuat tiga aspek pokok yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, laporan ini disebut juga “*triple bottom line reporting*” atau “*three in one reporting*”, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1
Indikator Kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Economic Performance	Environment Performance	Social Performance
a. Revenue b. Opening cost c. Employ compensation d. Donation and other community investment e. Payment to capital providers and to governments f. Coverage of the organisation's defined benefit pension plan obligation g. etc	a. Weight and material used b. Direct energy consumption c. Total water withdrawal d. Description of significant impact of activities on protected area. e. Percentage of product sold that is reclaimed at the end of the products useful life f. Incident of and fines or non monetary sanctions for, non compliance with applicable environmental regulation	a. Percentage of employee represented by independent trade union organization b. Average hours of training per year per employee c. Percentage of major suppliers and contractors that underwent screening of human right d. Extend of training and risk analysis to prevent corruption e. Program and practices for the impacts of operations on communities including entering, operating

	g. Greenhouse gas emissions	and existing
	h. Coverage of the organisation's defined benefit pension plan obligation	f. Etc
	i. Etc	

Sumber: Ali Darwin, EBAR Edisi III/ September-Desember 2005

Selain itu, yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan adalah visi, misi, kebijakan dan strategi perusahaan terutama yang berhubungan dengan ketiga aspek tersebut (ekonomi, lingkungan dan sosial). Laporan ini juga mengungkapkan profil ringkas perusahaan, parameter yang digunakan dalam laporan, tata kelola dan komitmen-komitmen serta tata hubungan dengan stakeholders. Pengukuran kinerja CSR dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek kunci berkelanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial). Dalam draft pedoman laporan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), telah disediakan seperangkat indikator untuk menilai kinerja berkelanjutan, yaitu 9 indikator kinerja ekonomi, 30 indikator kinerja lingkungan dan 40 indikator kinerja sosial. Uraian tentang indikator tersebut sebagian terdapat dalam tabel 1. Dari tabel tersebut patut digarisbawahi bahwa isu korupsi ternyata merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sosial.

Melalui laporan ini akan terungkap apakah perusahaan sudah menjalankan akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal. Untuk membangun akuntabilitas sosial dan lingkungan secara optimal, perusahaan bukan hanya diminta patuh secara ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga mengikuti *best practice*, norma-norma, konsensus-konsensus, dan inisiatif-inisiatif yang diprakarsai oleh berbagai institusi atau asosiasi industri terutama yang terkait dengan isu CSR. Di samping itu, perusahaan harus bersikap jujur dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada stakeholders, mengembangkan nilai-nilai (*values*) yang diyakini dalam budaya perusahaan untuk dianut oleh seluruh karyawan, serta merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, membangun hubungan yang baik dan terorganisir dengan para stakeholder dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, manajemen harus melaksanakan kebijakan yang telah digariskan, prosedur yang telah ditetapkan dan komitmen yang telah disepakati.

Selain daripada itu, melalui laporan berkelanjutan akan terungkap apakah tingkat keterbukaan perusahaan sudah satu level dengan harapan masyarakat, sampai sejauhmana perusahaan memahami ekspektasi para stakeholder, apa yang menjadi perhatian stakeholder dan bagaimana perusahaan menyikapinya. Dan apa yang dimaksud dengan dampak lingkungan. Lebih dari itu, dengan membuat laporan berkelanjutan akan terungkap apakah perusahaan sudah mengungkapkan informasi secara transparan dan jujur termasuk informasi negatif.

Standar Laporan Berkelanjutan

Suatu laporan dinilai bermutu apabila penyusunannya berpedoman pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang diterima umum, begitu pula halnya dengan laporan berkelanjutan. Pada tingkat global, sejak tahun 2000 telah dikembangkan berkelanjutan oleh

Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah sebuah lembaga independen, didirikan pada tahun 1997 di Boston Amerika Serikat, sekarang berpusat di Belanda. Pada tahun 2002 lahirlah standar generasi kedua yang disebut GRI Guidelines 2002 sebagai pengganti standar sebelumnya. GRI guidelines 2002 diluncurkan ketika *World Summit for Sustainable Development* tahun 2002 di Johannesburg. Setelah standar tersebut diterapkan selama tiga tahun, banyak masukan perbaikan dari penggunaannya sehingga sejak akhir tahun 2005, GRI kembali bekerja menyiapkan revisi GRI guidelines 2002. Peluncuran standar laporan berkelanjutan generasi ketiga ini yang disebut “*GRI’s G3 Guidelines*” akan dilaksanakan pada awal Nopember 2006, berbarengan dengan acara *Global Conference on Transparency and Sustainability* di Amsterdam Belanda.

Beberapa standar laporan yang sudah dikenal untuk menunjukkan *good business performance* adalah: *Standard Account Ability* (AA1000) berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* (3BL) yang digagas John Elkington, Pedoman Pelaporan Berkelanjutan *Global Reporting Initiative* (GRI), Pedoman Monitoring Verite, *Social Accountability International* (SA8000); dan Standard Manajemen Lingkungan ISO 14000.

Selanjutnya timbul pertanyaan untuk praktik pelaporan di Indonesia yaitu Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia? Apakah harus mengacu pada *GRI Guidelines* dalam menyusun laporan berkelanjutan? Seyogyanya jawaban adalah ya, karena kita belum mempunyai standar nasional. Saat ini hampir 1000 organisasi/perusahaan menggunakan *GRI guidelines* sebagai rujukan dalam membuat laporan berkelanjutan. Indonesia juga perlu memiliki standar tersendiri yang merupakan konvergensi atas *GRI guidelines*. Konvergensi ini penting agar investor dan stakeholder lainnya dapat memperoleh informasi sustainability dalam format yang sama dengan standar global. Untuk itulah, dengan diprakarsai oleh IAI-KAM pada pertengahan 2005, telah didirikan lembaga semacam GRI yang diberi nama *National Center For Sustainability Reporting* (NCSR). Lembaga independen ini memiliki misi: *Menyusun dan menyebarluaskan pedoman penyusunan laporan berkelanjutan untuk organisasi/perusahaan di Indonesia*. Diharapkan lembaga independen ini dapat diakui oleh regulator dan masyarakat sebagai institusi yang kredibel dan berkompeten dalam menyusun standar laporan berkelanjutan untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi di Indonesia.

Praktik Pelaporan Berkelanjutan

Dari survey yang dilakukan oleh organisasi akuntan di Inggris (ACCA), dilaporkan bahwa penerbitan laporan berkelanjutan telah muncul sejak tahun 1990 dalam bentuk laporan lingkungan (*environmental report*). Pada tahun 2003 sekitar 1200 perusahaan telah menerbitkan laporan ini, terutama di kawasan Eropa (54%), dan Asia & Australia (25%). Di Kawasan Asia, laporan berkelanjutan dalam bentuk laporan lingkungan muncul di Malaysia sejak tahun 1999. Di Singapore pada tahun 2003 sebanyak 14% dari 160 perusahaan publik di Singapore telah mempublikasikan laporan lingkungan.

Di Jepang laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk menerbitkan laporan ini meningkat setelah tahun 2001, pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya, pada tahun 2003 lebih dari 380 perusahaan besar di Jepang telah mengeluarkan laporan lingkungan. Dari 100 perusahaan terbesar di Jepang 78% diantaranya telah menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan Negara yang paling peduli terhadap penerbitan laporan berkelanjutan.

Oleh karena itu pengguna GRI guidelines terbanyak dari Jepang. Di Hongkong laporan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997, kemudian sejak itu hingga tahun 2003 sudah 20 perusahaan menerbitkan laporan berkelanjutan secara rutin setiap tahun.

Di Indonesia, diyakini bahwa banyak perusahaan yang telah melaksanakan CSR di lapangan. Akan tetapi belum banyak yang mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan. Hanya beberapa perusahaan yang telah mengungkapkan informasi lingkungan dan tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa di antaranya membuat laporan CSR tersendiri, terpisah dari laporan tahunan. Dari kegiatan *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) tahun 2005 yang diselenggarakan oleh IAI-KAM terungkap bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia yang mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004. Sedangkan perusahaan yang membuat laporan secara terpisah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Diharapkan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan terpisah akan semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari penyelenggaraan ISRA secara tahunan oleh IAI-KAM, di samping meningkatnya kesadaran perusahaan.

Jadi dibandingkan dengan negara lain, harus diakui bahwa perkembangan praktik laporan berkelanjutan di Indonesia berjalan lambat. Jika penyusunan laporan keuangan diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk laporan berkelanjutan belum ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pembuatan laporan tersebut. Apakah ini yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan masih enggan menyiapkan laporan berkelanjutan?. Sejatinnya penyusunan laporan berkelanjutan di beberapa negara masih bersifat *volunter*, kecuali Jepang dan Perancis, dimana kedua Negara ini sudah mewajibkan perusahaan tertentu untuk menerbitkan laporan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Indonesia?. Untuk mewajibkan penyusunan laporan berkelanjutan di Indonesia masih perlu waktu terutama kesiapan dalam *system* pendukung seperti adanya standar pelaporan yang diterima umum dan ketersediaan tenaga yang kompeten untuk menyusun laporan tersebut termasuk tenaga yang melakukan fungsi *assurance*. Oleh karena itu, sementara sistem dan perangkat pendukungnya belum tersedia, pelaporan tersebut di Indonesia masih dilakukan secara *volunteer*. Seperti yang disampaikan oleh Ali Darwin (2006) bahwa kewajiban pembuatan laporan berkelanjutan bagi perusahaan tertentu di Indonesia baru dapat diberlakukan secara efektif untuk laporan mulai tahun 2009 dengan asumsi yaitu setelah sistem dan perangkat pendukungnya tersedia. Untuk itu, promosi dan perhatian dari asosiasi profesi dan lembaga pendidikan, di samping dukungan pemerintah.

Namun demikian, untuk mempercepat proses dan sebagai pembelajaran serta untuk meningkatkan kesadaran manajemen akan arti penting informasi lingkungan dan sosial, maka regulator dapat mengeluarkan himbauan kepada perusahaan publik. Untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan, sedangkan pembuatan laporan secara terpisah sangat dihargai. Selain itu, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi bagi perusahaan berkaitan dengan tata kelola perusahaan termasuk pelaksanaan CSR.

Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Pengungkapan CSR

Untuk memberikan gambaran bahwa pengungkapan CSR menjadi suatu hal yang penting berkaitan dengan efektivitas kegiatan CSR, di bawah ini disajikan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan CSR dari berbagai aspek dan dimensinya.

Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan terhadap *return* saham perusahaan sudah dilakukan meskipun belum terlalu banyak dan hasilnya masih beragam. Penelitian empiris awal sudah dilakukan oleh Spicer (1978) yang meneliti mengenai asosiasi antara *investment value* dari saham perusahaan dan kinerja sosial perusahaan. Spicer (1978) menemukan bukti empiris yang menunjukkan adanya asosiasi yang signifikan antara kedua hal tersebut meskipun tingkat asosiasi dari tahun ke tahun menurun. Hasil penelitian empiris ini konsisten dengan persepsi investor bahwa ada asosiasi antara *investment value* dari saham perusahaan dan kinerja sosialnya. Spicer (1978) menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan agar dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian ini.

Penelitian empiris awal lainnya dilakukan Alexander dan Buchhloz (1978) yang meneliti mengenai hubungan antara tingkat CSR dan kinerja *stock market*. Penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Alexander et al (1978) mengemukakan bahwa salah satu kemungkinan penjelasan atas hasil penelitian tersebut adalah pasar modal yang sudah efisien, sehingga semua informasi sudah langsung tercermin dalam harga saham. Pengukuran tingkat CSR yang digunakan oleh Alexander adalah dengan ranking yang diberikan oleh pelaku usaha dan mahasiswa.

Epstein dan Freedman (1994, dalam Anggraini, 2006) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi tersebut mencakup keamanan dan kualitas produk, etika, dan hubungan dengan karyawan dan masyarakat.

Lajili dan Zeghal (2006) menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan informasi *human capital* (yang juga merupakan bagian dari CSR) memiliki kinerja pasar yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sedikit mengungkapkan informasi tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur *information value* dari informasi *human capital* dalam penelitian tersebut adalah *financial portfolio performance approach*.

Penelitian Suratno et al (2006) menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif terhadap *economic performance*. Meskipun penelitian ini AKPM-08 tidak secara langsung meneliti mengenai korelasi dari pengungkapan *environmental* terhadap kinerja ekonomi perusahaan, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Hal ini mengindikasikan bahwa *environmental disclosures* berkorelasi positif dengan *economic performance*. Penelitian ini mengukur *environmental disclosures* dengan mengidentifikasi delapan (8) item pengungkapan dengan metode *content analysis*. *Environmental performance* diukur dari prestasi perusahaan dalam mengikuti program PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Di sisi lain *economic performance* dalam penelitian ini diukur dengan *return* tahunan perusahaan relatif terhadap *return* industri.

Zuhroh dan Sukmawati (2003) melakukan pengujian empiris untuk mengetahui pengaruh dari luas pengungkapan sosial terhadap reaksi investor yang dicerminkan melalui

volume perdagangan saham perusahaan yang dikategorikan dalam industri *high profile*. Zuhroh et al (2003) menemukan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*.

Lutfi (2001, dalam Zuhroh et al, 2003) tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari praktek pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan harga saham. Hasil ini konsisten dengan Indah, 2001, dan Rasmiati, 2002 (dalam Zuhroh et al, 2003) yang juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pengungkapan sosial dengan volume perdagangan saham seputar publikasi laporan tahunan. Namun demikian, penelitian ini menemukan angka korelasi yang bernilai positif yang mengindikasikan bahwa informasi sosial yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan direspon baik oleh investor.

Penelitian yang menguji mengenai pengaruh pengungkapan dalam laporan tahunan terhadap ERC dilakukan oleh Widiastuti (2002) yang melakukan pengujian empiris atas pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap *Earning Response Coefficient* (ERC). Penelitian ini tidak menunjukkan hasil yang konsisten dengan prediksi tentang pengaruh luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap ERC. Prediksi penelitian ini adalah bahwa ada luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap ERC. Namun demikian, pengujian empiris justru AKPM-08 10 menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari luas pengungkapan sukarela terhadap ERC. Kemungkinan penjelasan atas hasil penelitian ini karena investor tidak cukup yakin dengan informasi sukarela yang diungkapkan manajemen sehingga investor tidak menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk merevisi *belief* (Widiastuti, 2002). Kemungkinan penjelasan kedua yang disebutkan Widiastuti (2002) adalah bahwa informasi sukarela yang diungkapkan perusahaan tidak cukup memberikan informasi tentang *expected future earnings* sehingga investor tetap akan menggunakan informasi laba sebagai proksi *expected future earnings*.

6. AUDIT KEGIATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (SOCIAL AUDIT)

Pada umumnya audit dikenal sebagai sebuah asesmen dan evaluasi yang melibatkan pengumpulan informasi mengenai sistem dan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Audit seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang kompeten, independen dan objektif yang dikenal sebagai auditor atau akuntan. Auditor internal adalah mereka yang menjadi pegawai sebuah perusahaan yang bertugas mengaudit sistem kontrol internal perusahaan tersebut. Di sisi lain, auditor eksternal merupakan staf independen yang ditunjuk oleh lembaga audit (*auditing firm*) untuk mengaudit laporan-laporan keuangan dari kliennya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Namun demikian, saat ini audit seringkali tidak hanya mencakup pengumpulan informasi tentang keuangan perusahaan, melainkan pula aspek lingkungan dan bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para pekerja sosial (*social worker*), konsultan atau analis kebijakan biasanya melakukan audit sosial (*social audit*) ini. Menurut Graham Boyd (1998: 1), audit sosial adalah:

A process that enables an organisation to assess and demonstrate its social, economic, and environmental benefits and limitations. It is a way of measuring the

extent to which an organisation lives up to the shared values and objectives it has committed to. Social auditing provides an assessment of the impact of an organisation's non-financial objectives through systematically and regularly monitoring its performance and the views of its stakeholders.

Proses audit sosial memerlukan komitmen yang kuat dari orang-orang kunci, seperti CEO dan Board of Director, dalam organisasi yang diaudit. Dalam implementasinya, audit sosial juga memerlukan keterlibatan stakeholders, termasuk pekerja, klien, voluntir, pendiri, kontraktor, supplier dan penduduk setempat yang terkait dengan operasi perusahaan. Para auditor sosial biasanya bekerjasama dengan shareholders dan stakeholders untuk merancang, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalisis informasi. Metoda penelitian yang digunakan melibatkan survey, wawancara, bookeeping dan bahkan studi kasus. Tujuan-tujuan organisasi merupakan *"the starting point"* dengan mana indikator-indikator dampak ditentukan, stakeholders diidentifikasi dan teknik-teknik penelitian dikembangkan secara rinci.

Tantangan dalam mengembangkan protokol audit program CSR tidak hanya terletak dalam kompleksitas perumusannya. Melainkan pula dalam implementasinya, dimana audit sosial melibatkan aspek lingkungan dan sosial yang relatif lebih sulit dirumuskan dan diukur ketimbang aspek finansial. Audit sosial memerlukan ahli yang memiliki kompetensi yang komprehensif di bidang lingkungan dan sosial, selain kemampuan dalam menerapkan berbagai metoda penelitian. Kesulitan utama dalam merancang sistem audit terhadap program CSR yang terstandar adalah merumuskan variabel dan indikator yang tepat dan dapat diterapkan kepada seluruh sektor. Dua syarat utama yang perlu dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Definisi berbagai kategori harus dapat diterapkan terhadap semua perusahaan, industri dan bahkan sistem sosial yang memungkinkan analisis komparatif dapat dilakukan
2. Kategori-kategori untuk mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan perusahaan haruslah stabil dalam kurun waktu tertentu, sehingga perbandingan historis dapat dilakukan.

Sebagai gagasan awal, matriks pada Tabel. 2 memberi gambaran mengenai framework audit terhadap program CSR. Aspek-aspek dalam tabel tersebut dikembangkan berdasarkan definisi CSR yang telah dirumuskan, yakni sebagai: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Adapun uraian berkaitan dengan framework audit CSR akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2

Framework Audit Program Corporate Social Responsibility CSR)

	PERTANYAAN DASAR	KRITERIA CSR YANG BAIK	SUMBER DATA/ RESPONDEN
--	------------------	------------------------	---------------------------

Profit	<ul style="list-style-type: none"> • Seberapa besar proporsi uang yang dikeluarkan perusahaan untuk CSR? • Dari mana pos anggaran CSR tersebut diambil, apakah diperhitungkan sebagai biaya perusahaan atau diambil dari laba kotor atau bersih perusahaan. 	<p>Anggaran sekitar 2% yang disisihkan dari laba bersih perusahaan</p> <p>Semakin besarnya perhatian para penentu kebijakan perusahaan terhadap prioritas anggaran CSR</p>	CEO, Board of Directors, pegawai/staf perusahaan, LSM mitra, kontraktor
Planet	<ul style="list-style-type: none"> • Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan? • Apa dampaknya bagi kondisi lingkungan sekitar? 	<p>Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan</p> <p>Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan (misalnya limbah)</p> <p>Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan</p> <p>Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan</p>	Pegawai perusahaan, kontraktor, <i>supplier</i> , pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa
People	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial? ▪ Apa dampaknya bagi kondisi masyarakat, khususnya komunitas lokal 	<p>Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat (misalnya penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, modal usaha dan pelatihan wirausaha, kecakapan hidup)</p> <p>Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal</p> <p>Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan kemandirian masyarakat</p> <p>Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan sistem sosial (jarak sosial, kecemburuan sosial, konflik)</p>	Pegawai perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa

Prosedure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana program CSR tersebut dilaksanakan? ▪ Apakah prosesnya dilakukan sesuai prosedur yang benar? 	<p>Dilakukan oleh lembaga yang “terpisah” dari perusahaan (misalnya bermitra dengan perguruan tinggi, LSM atau organisasi lokal yang <i>credible</i>)</p> <p>Melibatkan ahli-ahli yang profesional di bidangnya</p> <p>Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan</p> <p>Keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari pemerintah, LSM dan masyarakat, serta adanya koordinasi yang baik diantara mereka</p> <p>Perencanaan Program, Monitoring & Evaluasi</p>	<p>Pegawai perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa, asosiasi profesi, akadem</p>
------------------	--	---	---

Sumber: Edi Suharto/CSRAudit/2008

Audit CSR pada prinsipnya adalah kegiatan yang mengaudit kegiatan CSR dan pelaporannya. Artinya bahwa kegiatan audit CSR harus didasarkan pula pada prinsip-prinsip pelaporan CSR. *Global Reporting Initiative* menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat pelaporan CSR yang baik (Sukada dan Jalal, 2008: 10-11):

- a. *Accuracy*: informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.
- b. *Balance*: seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.
- c. *Comparability*: aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dibandingkan antar waktu.
- d. *Clarity*: informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- e. *Reliability*: informasi harus ajeg dan terpercaya yang dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. *Timeliness*: laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

Lebih jauh dengan adanya audit CSR, diharapkan bahwa kegiatan CSR tidak cukup untuk diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tetapi juga diaudit untuk memperoleh keyakinan bahwa kegiatan CSR yang telah dijalankan telah sesuai dengan apa yang seharusnya, informasi tersebut dalam jangka panjang tidak sekedar akan menaikkan citra perusahaan tetapi lebih jauh nilai perusahaan akan meningkat. Dengan kata lain jangan simpan laporan implementasi dana CSR di gudang, tetapi biarkan publik mengetahui apa yang dilakukan perusahaan, dan berapa besar dana CSR yang dikeluarkan.

7. KESIMPULAN

Secara sempit, CSR dipersepsikan sebagai kegiatan donasi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate philanthropy*), sedangkan secara luas CSR pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme pengintegrasian isu sosial dan isu lingkungan ke dalam operasi perusahaan dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam pengertian tersebut, CSR dianggap sebagai kerangka strategis baru untuk meningkatkan daya saing dan mencapai bisnis berkelanjutan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa investor saat ini telah meleak CSR dengan memberikan perhatian yang besar bagi perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya motivasi bagi perusahaan, tidak saja mengimplementasikan CSR sebaik mungkin tetapi juga mampu mengungkapkan dan mengaudit kegiatan CSR tersebut.

Audit CSR memberi gambaran mengenai framework audit terhadap program CSR. Aspek-aspek dalam tabel tersebut dikembangkan berdasarkan definisi CSR yang telah dirumuskan, yakni sebagai: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

Untuk itulah, dalam rangka meningkatkan kegiatan CSR dalam arti sesuai dengan spirit sebagai upaya menunaikan tanggung jawab sosial perusahaan, maka pengungkapan dan audit kegiatan CSR menjadi sangat penting. Untuk itulah makalah ini dengan segala kekurangannya mencoba menjelaskan bagaimana pengungkapan CSR yang di dalamnya berkaitan dengan pelaporan CSR juga menjelaskan audit CSR dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Darwin. 2005. akuntabilitas, Kebutuhan, Palaporan dan pengungkapan CSR Bagi Perusahaan di Indonesia. EBAR. Edisi III September-Desember 2006.
- Boyd, Graham (1998), *Social Auditing: A Mehod of Determining Impact*, <http://www.caledonia.org.uk/socialland/social.htm> (diakses 10 Maret 2008)
- Elkington, John (1998), *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers
- Majalah Bisnis dan CSR (2007), *Regulasi Setengah Hati*, Edisi Oktober

- Morimoto, Ash dan Hope (2004), *Corporate Social Responsibility Audit: From Theory to Practice*, Cambridge: The Judge Institute of Management, University of Cambridge
- Suharto, Edi (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama (cetakan kedua)
- Suharto, Edi (2007a), *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi (2007b), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi (2008), "Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari
- Sukada, Sonny dan Jalal (2008) "Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari
- Suratmo, Sribugo (2008), "Implementasi CSR di Perusahaan" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari
- Wikipedia (2008), *Corporate Social Responsibility*, social_responsibility (diakses 20 Februari) <http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate>